



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS **Nomor: 20/HM.00/IV/2024**

Pemantauan Komnas HAM terkait Pembangunan Ibu Kota Negara: Mendorong Dialog dan Dekriminalisasi

Pada 1-3 April 2024, Komnas HAM telah melaksanakan pemantauan lapangan sebagai langkah tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan sejumlah kasus yang berkembang sehubungan dengan proyek Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur.

Tim melakukan serangkaian permintaan keterangan dan informasi kepada berbagai pihak, di antaranya ajaran Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Timur di Kota Balikpapan, Pimpinan Proyek Badan Bank Tanah Kabupaten Penajam Paser Utara (Kab. PPU), Kelompok Warga di Desa Pamaluan, Kelompok Masyarakat Adat Paser di Kelurahan Pantai Lango. Selain itu, tim juga meninjau secara langsung beberapa titik lokasi sengketa di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara serta berdialog dengan masyarakat yang terdampak dan berpotensi di sekitar kawasan IKN seperti Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada pertemuan yang dilakukan dengan Badan Bank Tanah pada 1 April 2024, Komnas HAM meminta keterangan terkait konflik lahan di atas HPL Bank Tanah, sekaligus mendorong penanganan dan/penyelesaian tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat, khususnya yang terdampak pembangunan IKN.

Kemudian pada 2 April 2024, Komnas HAM bertemu dengan perwakilan OIKN di Balikpapan guna memperoleh penjelasan terkait pengaduan masyarakat Pamaluan di Kabupaten Penajam Paser Utara, terkait surat peringatan OIKN terhadap masyarakat desa Pamaluan untuk membongkar pemukimannya. Komnas HAM mengimbau OIKN untuk mengadopsi pendekatan dialogis dan mengedepankan aspek kemanusiaan dalam menanggapi permasalahan sosial dan agraria.

Terakhir, Komnas HAM melangsungkan pertemuan dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur guna meminta keterangan terkait peristiwa dugaan penggundulan terhadap 9 (sembilan) orang Kelompok Tani Seloloang di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang ditetapkan sebagai tersangka pengancaman proyek IKN. Pada pertemuan ini, Komnas HAM mendorong agar penyelesaian kasus ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip hak asasi manusia dan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.

Jakarta, 5 April 2024

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Uli Parulian Sihombing
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM